

## **KAJIAN TENTANG KESIAPAN TNI AD DALAM MENGHADAPI ANCAMAN ASIMETRIS**

### **BAB-I**

#### **PENDAHULUAN**

##### **1. Umum.**

a. Pergantian milenium dari abad 20 ke abad 21 ditandai dengan berbagai perubahan yang sangat urgen baik dalam perkembangan iptek maupun konstelasi global. Negara-negara besar berupaya mengembangkan teknologi canggih untuk menjadikan kekuatan guna menekan negara lain, sebaliknya negara berkembang yang tidak memiliki kemampuan mengembangkan teknologi canggih berupaya memanfaatkan kemajuan teknologi dengan mengembangkan perang asimetris. Negara lemah mengembangkan perang asimetris dengan kekuatan taktik kecil dengan harapan mampu mengalahkan kekuatan besar yang berteknologi tinggi. Permasalahan yang timbul saat ini, perang asimetris ternyata tidak hanya dihadapi oleh negara maju saja melainkan harus dihadapi oleh negara berkembang termasuk Indonesia baik dalam bentuk ancaman *non states actors* maupun separatis yang menggunakan pola asimetrisnya.

b. TNI AD sebagai bagian dari TNI memiliki tugas pokok menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah, serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara di darat. Untuk mendukung tercapainya tugas pokok secara optimal, maka TNI AD membangun postur TNI AD berupa kekuatan, kemampuan dan gelar satuan secara efektif, efisien dan modern serta berdaya guna. Ada pertanyaan penting berkaitan kondisi diatas. Bagaimana kesiapan TNI AD dengan postur yang sudah dibangun saat ini dalam menghadapi ancaman asimetris yang berkembang di dunia ?

c. Memahami pokok permasalahan di atas dan sebagai lembaga kajian strategis TNI AD, maka Seskoad memandang perlunya membuat kajian tentang **Kesiapan TNI AD dalam Menghadapi Ancaman Asimetris**, sehingga kajian ini memiliki arti penting dalam membangun postur TNI AD yang akan datang.

## 2. Maksud dan Tujuan.

a. **Maksud.** Kajian ini untuk memberikan gambaran tentang kesiapan TNI AD dalam menghadapi ancaman asimetris.

b. **Tujuan.** Sebagai bahan masukan kepada pimpinan dalam menentukan kebijakan lebih lanjut tentang penyiapan TNI AD untuk menghadapi ancaman asimetris yang datang dari luar maupun yang timbul di dalam negeri.

### 3. Ruang Lingkup dan Tata Urut.

a. **Ruang Lingkup.** Kajian ini dibatasi pada pembahasan peristiwa-peristiwa yang melatarbelakangi munculnya ancaman asmetris di Indonesia dan kesiapan TNI AD dalam perspektif kekuatan, kemampuan dan gelar untuk menghadapi ancaman asmetris.

b. **Tata urut.** Sistematika kajian ini disusun dengan tata urut sebagai berikut :

- 1) Pendahuluan.
- 2) Latar belakang pemikiran
- 3) Data dan fakta
- 4) Analisa
- 5) Penutup

### 4. Metode dan Pendekatan.

a. **Metode.** Kajian ini menggunakan metode deskriptif analisis, menghadapi kondisi postur TNI AD saat ini dan ancaman asimetris yang mungkin timbul.

b. **Pendekatan.** Pembahasan kajian ini menggunakan pendekatan kepustakaan dan perkembangan lingkungan strategis.

## 5. Pengertian.

a. **Steven Metz dari U.S. Army War College dalam buku *Asymmetry And U.S. Military Strategy: Definition, Background, And Strategic Concepts*.** Asimetris artinya bertindak, pengorganisasian, dan berpikir secara berbeda dibandingkan lawan untuk memaksimalkan keuntungan diri sendiri, mengeksploitasi kelemahan lawan, memperoleh inisiatif, atau kebebasan yang lebih besar untuk tindakan. Asmetris dapat bersifat politik-strategis, militer-strategis, operasional atau kombinasi. Asimetris menggunakan metode yang berbeda, teknologi, nilai-nilai, organisasi, perspektif waktu atau beberapa kombinasi tersebut, dapat jangka pendek atau jangka panjang, disengaja atau secara kebetulan, bersifat rahasia atau dilakukan bersama dengan pendekatan simetris serta dapat berdampak psikologis dan fisik.

b. **Sun Tzu dalam buku *The Art of War*.** Menyatakan bahwa semua peperangan pada dasarnya selalu berlandaskan pengelabuan, ketika berhadapan dengan musuh, kita harus memberinya umpan untuk memancingnya, menimbulkan kekacauan dan memukulnya. Manakala musuh terkonsentrasi, bersiaplah menyerangnya, dan bila musuh kuat, jauhilah.

c. **Departemen Pertahanan Amerika Serikat.** Perang asimetris sebagai "perang yang tidak konvensional dengan spektrum perang yang sangat luas melalui penggunaan militer,

para militer dan informasi-informasi perang, yang dibangun oleh bangsa-bangsa, organisasi, perseorangan, suku-suku asli tertentu melalui kekuatan-kekuatan tanpa bentuk yang mereka manfaatkan, khususnya penyerangan-penyerangan pada sasaran yang lemah dan rawan dari suatu pemerintahan dan kekuatan angkatan bersenjata”.

**d. Dewan Riset Nasional dalam seminar tentang perang asimetris 2007.** Perang Asimetris adalah perang antara dua pihak dengan kekuatan yang tidak seimbang (David & Goliath) dengan pola yang tidak beraturan dan bersifat tidak konvensional. Masing-masing pihak berusaha untuk mengembangkan taktik dan strategi untuk mengeksploitasi kelemahan lawannya dalam mencapai kemenangan. Perang Asimetris adalah suatu model peperangan yang dikembangkan dari cara-cara berfikir yang tidak lazim, dan diluar aturan-aturan peperangan yang berlaku, dengan spektrum perang yang sangat luas, terbuka dan mencakup seluruh aspek-aspek kehidupan. Terminologi Perang Asimetris digunakan untuk membedakan dengan perang konvensional, dimana musuh yang dihadapi jelas, aktornya negara, yang didukung oleh pasukan dengan aturan yang jelas dan peralatan militer yang dibolehkan oleh konvensi internasional.

e. Meskipun penyebutan asimetris dalam dokumen resmi militer Indonesia belum sepenuhnya populer bahkan dalam Buku Putih Dephan 2003 dan 2008 belum mendefinisikan asimetris ini secara spesifik. Dengan demikian usulan pendefinisian tentang ancaman asimetris adalah sebagai berikut. Upaya untuk melemahkan kemampuan negara dengan menggunakan taktik, teknik, strategi dan senjata yang inovatif, non tradisional/non konvensional untuk mengeksploitasi kelemahan dan dapat digunakan dalam semua level baik taktis, operasional maupun strategis untuk mencapai tujuan politiknya.

## **BAB-II**

### **LATAR BELAKANG PEMIKIRAN**

6. **Umum.** Perang asimetris merupakan ancaman yang dapat terjadi setiap saat di seluruh Indonesia. Hal tersebut harus dapat diantisipasi oleh bangsa Indonesia terutama oleh TNI khususnya TNI AD sebagai institusi matra darat. Dalam membahas ancaman asimetris diperlukan beberapa landasan pemikiran antara lain landasan filosofis, landasan historis, landasan operasional dan adanya dasar pemikiran bahwa Bangsa Indonesia tidak mungkin menghindarkan diri dari perkembangan global serta interaksi yang mempertautkan antara persoalan domestik dengan kepentingan global yang sangat mungkin menimbulkan ancaman asimetris.

#### **7. Landasan Pemikiran.**

##### **a. Landasan Filosofis.**

- 1) Landasan Idiil Pancasila. Sila ke-3 yaitu **Persatuan Indonesia** intinya mengamanatkan rela berkorban demi kepentingan bangsa dan negara serta cinta tanah air termasuk di dalamnya menjaga kedaulatan NKRI. Ancaman terhadap NKRI dalam bentuk pertentangan paham dengan ideologi Pancasila merupakan *ancaman asimetris* yang harus dihadapi bangsa Indonesia dalam rangka menegakkan ideologi Pancasila.
- 2) Landasan Konstitusional. Pembukaan UUD 1945 pada alinea keempat menyatakan Pemerintah Negara Indonesia wajib melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh

tumpah darah Indonesia. Hal tersebut mengamanatkan kepada TNI khususnya TNI AD untuk menjaga kedaulatan NKRI di darat dari berbagai ancaman termasuk ancaman asimetris.

### 3) Landasan Konseptual

a) Ketahanan Nasional. Pada hakekatnya berisi keuletan dan ketangguhan bangsa dan negara dalam menghadapi setiap ancaman dengan memberdayakan faktor ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, militer, agama serta informasi dan teknologi, untuk menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara dalam mencapai tujuan nasional. Ketahanan Nasional yang tangguh pada dasarnya merupakan suatu kekuatan untuk menghadapi ancaman asimetris.

b) Wawasan Nusantara. Hakekat Wawasan Nusantara merupakan cara pandang bangsa Indonesia berlandaskan Pancasila dan UUD 1945 tentang diri dan lingkungannya dalam menjaga eksistensinya yang sarwa Nusantara dalam mengekspresikan diri di tengah-tengah lingkungan nasionalnya. Wawasan Nusantara yang dipahami dan diyakini oleh seluruh bangsa Indonesia akan merupakan benteng tangguh dalam menghadapi kemungkinan adanya ancaman asimetris.



**b. Landasan Historis**

1) Internasional. Sejarah perang dunia secara simultan telah melahirkan fenomena perang asimetris yang dikembangkan oleh negara-negara lemah untuk memenangkan peperangan terhadap negara kuat antara lain :

a) Perang Spanyol (1865-1869) untuk pertama kalinya mengemuka istilah gerilya dari kata *Guerra* yang berarti “perang kecil.” Ini merupakan sebutan gerilyawan Spanyol yang saat itu sangat efektif dalam melawan pasukan Napoleon yang berjumlah besar. Para gerilyawan Spanyol mengganggu suplai dan jalur komunikasi tentara Napoleon sehingga banyak menimbulkan kerugian dan kerusakan. Perang Spanyol merupakan awal terjadinya perang gerilya yang juga merupakan perang asimetris.

b) Perang Vietnam (1945 – 1975). Dalam lingkup Asia, peperangan yang terjadi antara pasukan gabungan Perancis dan Amerika Serikat melawan Vietnam. Dari perbandingan kekuatan pasukan yang bertempur baik dari jumlah pasukan dan kecanggihan teknologi sangat tidak seimbang, namun suatu kenyataan bahwa pertempuran tersebut dimenangkan oleh pasukan yang relatif kecil yang menggunakan peralatan yang sederhana.

c) Tragedi WTC (11 September 2001). Istilah asimetris mengemuka setelah terjadinya serangan di World Trade Center, New York pada 11 September 2001. Dua pesawat penumpang berbahan bakar penuh menghunjam ke arah menara kembar WTC dan meruntuhkan simbol

kapitalisme global Amerika Serikat. Akibat serangan tidak terduga ke jantung negeri tersebut, AS terhenyak dan tidak mampu berbuat banyak, kecuali menyatakan Perang Global terhadap terorisme (Global War On Terrorism).

2) Nasional. Dalam sejarah perang yang terjadi di Indonesia terdapat beberapa perang yang mengarah pada konsep perang asimetris antara lain :

a) Pertempuran Surabaya (1945). Dalam pertempuran Surabaya kehadiran Bung Tomo yang berhasil membangkitkan semangat rakyat Indonesia khususnya rakyat Surabaya untuk menghadapi kekuatan Sekutu. Pemuka masyarakat mewajibkan jihad bagi setiap rakyatnya dan menyatukan kekuatan laskar dengan kekuatan rakyat Surabaya, sehingga pertempuran tersebut berhasil mengusir tentara Sekutu dan menewaskan Brigadir Jenderal AWS Mallaby dengan bermodalkan senjata seadanya. Berkat kekuatan semangat persatuan dan kesatuan serta rela berkorban demi negara dan bangsa akhirnya pertempuran tersebut dimenangkan oleh bangsa Indonesia.

b) Perang Gerilya Jenderal Sudirman (1948). Perang yang dipimpin Jenderal Sudirman dengan mengembangkan teknik perang gerilya melawan serdadu Belanda yang berhasil menyerang pasukan Republik Indonesia yang baru saja dibentuk di Yogyakarta pada tanggal 19 Desember 1948 dengan kekuatan dan persenjataan yang lengkap.

Walaupun Presiden Soekarno memutuskan untuk memecahkan permasalahan secara diplomatis, namun Jenderal Sudirman meneruskan perjuangan sebagai pemimpin pasukan gerilya. Dengan keyakinan bahwa tugas pokok tentara adalah untuk membela negaranya, maka perjuangan Jenderal Sudirman melalui perang gerilyanya berhasil mendukung diplomasi politik dan berhasil mengubah opini dunia, sehingga negara-negara PBB meyakini Indonesia harus diakui kedaulatannya.

**c. Landasan Operasional.**

1) UU RI No 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, Pasal 1 menyatakan bahwa Sistem pertahanan negara adalah sistem pertahanan yang bersifat semesta yang melibatkan seluruh warga negara, wilayah dan sumberdaya nasional lainnya, serta dipersiapkan secara dini oleh pemerintah dan diselenggarakan secara total, terpadu, terarah, dan berlanjut untuk menegakkan kedaulatan negara, keutuhan wilayah dan keselamatan segenap bangsa dari segala ancaman<sup>1</sup>. Kesemestaan inilah yang diperlukan untuk menghadapi kemungkinan ancaman asimetris.

2) UU RI No 34 Tahun 2004 tentang TNI mengamanatkan tugas yang harus diemban oleh TNI AD adalah sebagai berikut :

a) melaksanakan tugas TNI matra darat di bidang pertahanan.

---

<sup>1</sup> Salim Said, Soeharto's Armed Forces, 40, Pustaka Sinar Harapan 2006.

- b) melaksanakan tugas TNI dalam menjaga keamanan wilayah perbatasan darat dengan negara lain.
- c) melaksanakan tugas TNI dalam pembangunan dan pengembangan kekuatan matra darat.
- d) melaksanakan pemberdayaan wilayah pertahanan di darat.

d. **Landasan Teori.** Bentuk perang dalam peradaban manusia mengalami berbagai perkembangan taktik dan teknik pertempuran serta penggunaan teknologi pemusnah secara pesat. Pada abad ke 18 bentuk perang generasi pertama didominasi formasi berhadapan dengan penggunaan senjata pelocok. Perkembangan perang selanjutnya merupakan perang generasi kedua yang ditandai dengan penggunaan senjata api lebih akurat sehingga tidak memungkinkan formasi berhadapan dengan ciri khas parit pertahanan sebagaimana kita lihat pada Perang Dunia ke I. Bentuk perang berkembang menjadi perang generasi ketiga, merupakan perang yang didominasi oleh gerakan cepat pasukan mekanis dan ofensif sebagaimana teknik Blitzkrieg dari Jerman pada Perang Dunia ke II. Perang generasi keempat secara logika merupakan penerus dari bentuk Perang Simetris yang meninggalkan teknik tradisional dan prinsip yang usang.

Martin van Creveld berpendapat bahwa konsep Clausewitz tidak bisa diterapkan dalam strategi dan filosofi perang generasi keempat. Ia bahkan berpendapat bila trend ini berlanjut maka pemisahan antara pemerintah, tentara dan rakyat tidak terlihat lagi dalam bentuk perang ini. Sebaliknya di masa depan perang tidak akan dilaksanakan oleh tentara, namun oleh apa yang saat

ini kita sebut teroris, gerilya, para bandit dan perampok. Kemungkinan besar organisasinya akan disusun menggunakan garis tokoh karismatik bukan organisasi yang kita kenal sekarang, sedangkan profesionalisme akan digantikan oleh fanatisme berdasarkan kesetiaan ideologi sebagaimana kita lihat dari serangan Al Qaeda pada 11 September 2001. Sebenarnya masalah ini bukanlah hal baru, karena secara umum merupakan variasi dari Perang Asimetris. Istilah perang generasi keempat merupakan pendapat bahwa perang modern merupakan serangkaian bentuk peperangan.

1) Teori Perang Asimetris. Perang asimetris yaitu peperangan menggunakan sistem dan tujuan (susunan bertempur) yang inkonvensional, mempunyai banyak nama diantaranya istilah yang populer adalah peperangan asimetris (*asymmetrical warfare*). Beberapa jenis perang yang termasuk asimetris:

a) Insurjensi. Awalnya merupakan perang revolusi untuk menggulingkan pemerintahan, sebagai dampak munculnya nasionalisme melawan penjajahan. Namun demikian setelah penjajahan berakhir ternyata tidak banyak menghasilkan perubahan sebagaimana yang diharapkan. Dihadapkan dengan perbandingan kekuatan dari unsur-unsur insurjen melawan pemerintah yang sah, kekuatan insurjen yang kecil menggunakan model peperangan dan cara-cara berfikir yang tidak lazim diluar aturan-aturan peperangan yang berlaku dengan spektrum perang yang sangat luas, terbuka dan mencakup seluruh aspek-aspek kehidupan dalam mencapai tujuannya.

b) Perang Internal Baru (New Internal Warfare). Istilah Perang Internal baru dipopulerkan oleh Collins Gray yang artinya mengesampingkan aturan yang berlaku dalam perang konvensional, namun berbeda dalam metode maupun tujuan politiknya. Perbedaan yang tajam adalah terjadinya kekacauan luar biasa, kekerasan dan penderitaan sesama warga yang menjadi korban. Perang ini sangat sengit, berdarah dan mengerikan. Tujuannya seringkali bukanlah untuk mengganti pemerintahan, namun untuk menciptakan kekacauan sehingga ada peluang bagi pemberontak untuk meluncurkan usahanya seperti melindungi perdagangan narkoba (*narco-insurgency*), mengontrol wilayah atau mengontrol perdagangan berlian secara ilegal dan lain-lain.

c) Terorisme merupakan bentuk terakhir dari perang asimetris. Penggunaan metode teror pada dasarnya yang paling melanggar kaidah-kaidah konvensional serta konvensi tentang penggunaan kekuatan bersenjata yang sah dibandingkan berbagai bentuk perang lainnya dan biasanya dilakukan oleh *nonstate actors*. Metode teror ini memungkinkan kekuatan bersenjata yang jauh lebih rendah kemampuannya menyerang langsung kepada masyarakat yang menjadi sasarannya. Inti dari terorisme adalah untuk menciptakan kekuatan di masyarakat, sehingga pada suatu titik masyarakat memilih memenuhi segala tuntutan yang diajukan teroris daripada terus hidup dalam ketakutan. Terorisme sebagaimana perang generasi keempat umumnya tidak mencari kemenangan fisik dari

musuh yang jelas unggul secara militer, namun lebih mencari hal yang menyebabkan moral musuh hancur dengan mengganggu tertib sosial. Biasanya teroris memilih dan menyerang sasaran dengan cara dan pola tidak terduga.

2) Teori perang Gerilya. Perang gerilya merupakan suatu cara berperang non konvensional yang dilakukan oleh si lemah atau si kecil melawan si kuat atau si besar guna mencapai tujuan politiknya. Dilihat dari perang/operasi gerilya yang dilakukan di beberapa negara dewasa ini kekuatan perang/gerilya terdiri dari komponen/unsur-unsur ideologi, politik, sosial ekonomi dan militer yang dilaksanakan secara bersamaan. Organisasi internasional dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) juga dapat dilibatkan baik secara terbuka maupun secara tertutup dengan mengangkat isu HAM dan demokratisasi untuk mendukung pelaksanaan perang/operasi gerilya. Organisasi militer yang beroperasi baik secara terbuka maupun secara tertutup tidak dapat menentukan kemenangan tanpa didukung oleh front-front yang lain (politik, ekonomi, sosial budaya). Peran Operasi Gerilya memiliki jangkauan luas dalam spektrum perang yang kita kenal mulai dari Perang Revolusioner sampai dengan Perang Nuklir berskala taktis. Jenderal Nasution dalam bukunya "Pokok-pokok Perang Gerilya", menyatakan bahwa dalam perang gerilya bukan hanya kedua pihak angkatan bersenjata yang berperang, namun menjadi lebih luas karena kemajuan teknologi.

Perang ini akan bersifat semesta karena seluruh rakyat, harta benda dan tenaganya serta sumber-sumber yang ada harus digunakan untuk mencapai kemenangan.

## **8. Dasar Pemikiran.**

a. Geografi. Indonesia sebagai negara kepulauan yang berada diantara benua (Asia dan Australia) dan dua Samudera (Pasifik dan Hindia), menempatkan Indonesia menjadi negara yang sangat mempengaruhi kepentingan negara-negara dari berbagai kawasan. Posisi strategis ini menyebabkan kondisi politik, ekonomi, dan keamanan di tingkat regional dan global menjadi faktor yang berpengaruh terhadap kondisi Indonesia. Dalam era globalisasi abad ke 21 ini perkembangan lingkungan strategis regional dan global lebih menguat pengaruhnya terhadap kondisi nasional karena diterimanya nilai-nilai universal.

b. Sejak tragedi yang menimpa World Trade Center (WTC) di Amerika Serikat pada 11 September 2001, terorisme internasional menjadi bentuk perang yang baru, merupakan ancaman asmetris dan menjadi ancaman nyata bagi dunia. Upaya nyata dan kerja keras masyarakat internasional dalam memerangi terorisme internasional belum mampu sepenuhnya menghentikan aksi terorisme internasional. Bahkan setahun setelah tragedi WTC, teroris beraksi kembali di Bali dan dikenal sebagai tragedi Bali 12 Oktober 2002 dan sampai tahun 2008 terorisme global masih eksis menunjukkan kegiatannya.



c. Postur TNI AD yang dibangun sejalan dengan kebutuhan Negara untuk mengantisipasi, menangkal dan menghancurkan kekuatan lawan yang datang dari luar maupun dari dalam negeri, baik dalam bentuk ancaman asimetris maupun ancaman konvensional. Pembangunan postur TNI AD untuk pemenuhan kebutuhan kekuatan, kemampuan, gelar serta peningkatan profesionalisme di seluruh tanah air diharapkan mampu menjadi penegak dan penangkal kedaulatan negara dan bangsa. Disisi lain perkembangan ancaman terutama ancaman asimetris juga semakin meningkat seperti dijelaskan pada point b diatas. Dengan kondisi tersebut menimbulkan pertanyaan apakah dengan postur TNI AD saat ini sudah siap dalam menghadapi ancaman asimetris?

### **BAB-III**

## **DATA DAN FAKTA**

9. **Umum.** Perkembangan lingkungan strategis pada era globalisasi berubah sedemikian pesat, cepat dan dinamis. Tantangan dan permasalahan dimasa yang akan datang cenderung semakin komplek. Hal ini disebabkan persaingan negara maju untuk mempengaruhi negara berkembang, sehingga berpengaruh terhadap hubungan antar negara regional dan internasional. Salah satu dampak yang menjadi ancaman terhadap pertahanan negara adalah bangkitnya kelompok separatis dan kelompok politik yang selama ini tidak mendukung kebijakan pemerintah, bangkit dan mengkristalnya kelompok-kelompok di atas telah menjadi wujud ancaman asimetris bagi NKRI.

### **10 Timbulnya Ancaman Asimetris.**

#### **a. Konflik dalam negeri**

1) Konflik Vertikal. Dalam perjalanan sejarah Indonesia memiliki beberapa daerah yang terlibat dalam konflik berupa konflik Vertikal. Konflik tersebut merupakan suatu konflik yang timbul ditengah-tengah masyarakat Indonesia sendiri sebagai dampak kurang puasnya masyarakat tersebut terhadap kebijakan pemerintah, sehingga muncul menjadi ancaman asimetris terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia ini, antara lain :

a) Konflik Aceh. Tiga akar konflik yang berkaitan dengan relasi kekuasaan antara pemerintah pusat dengan sebagian masyarakat Aceh yakni; ekonomi-politik dan sosiologi-politik. Sejarah menggambarkan bahwa pada waktu lalu, Teungku Daud Beure'uh yang mendukung kemerdekaan Indonesia dari Belanda telah melakukan negosiasi dengan pemerintah pusat yang berisikan otonomi politik dengan penyelenggaraan syariat Islam, namun setelah Indonesia merdeka ternyata Aceh tidak diberikan otonomi malah diintegrasikan ke dalam Provinsi Sumatera Utara. Sebagai sebuah komunitas, Aceh telah punya konsep yang mapan tentang budaya dan agama Islam yang berkembang sejak masa kerajaan Samudera Pasai. Pemerintah pusat yang melakukan peminggiran identifikasi kultural masyarakat Aceh yang dilekatkan pada agama Islam ini kemudian mendorong negosiasi politik antara pimpinan Aceh dengan pemerintah. Kekecewaan ini kemudian muncul dalam bentuk pembentukan tentara Darul Islam/Tentara Islam Indonesia di Aceh pada tahun 1953 dan melakukan pemberontakan. Pemberontakan tersebut berakhir pada tanggal 26 Mei 1959 saat Aceh diberi status Daerah Istimewa dengan otonomi luas menyangkut bidang adat, agama, dan pendidikan.

Perkembangan sistem pemerintahan Orde Baru selanjutnya, pemerintah pusat menerbitkan UU No.5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah dan UU No.5 tahun 1979 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Desa. Kedua Undang Undang tersebut mengatur struktur modern berupa RT, RW, Dusun, Desa, Kecamatan, Kabupaten, dan Provinsi harus diterapkan di Aceh menggantikan lembaga-lembaga adat yang telah ada sejak lama, sehingga kekhasan sosio-kultural Aceh tereliminasi. Aceh pun mengeluhkan masalah eksploitasi dan ketimpangan ekonomi. Penekanan pemerintah Orde Baru pada pertumbuhan ekonomi mendorong eksploitasi besar-besaran pabrik LNG Arun dan pupuk Iskandar Muda. Dengan eksploitasi tersebut, Indonesia mampu keluar selaku eksportir LNG terbesar dunia dan 90% hasil pupuk pabrik di Aceh ini digunakan untuk ekspor. Eksploitasi kekayaan alam ini kemudian mendatangkan masalah tatkala terjadi minimalisasi pengembalian pendapatan ke Aceh.

Masyarakat Aceh mulai menyadari bahwa hasil tambang (gas dan minyak) hasil bumi mereka lebih banyak yang dibawa ke Jakarta ketimbang dikembalikan ke Aceh dan bermuara pada konflik militer GAM versus Pemerintah Pusat, dan di lapangan adalah ABRI (saat itu) versus GAM. Aceh masuk ke dalam Daerah Operasi Militer (DOM). Kondisi ini bukannya melemahkan GAM,

justru sebaliknya, memperkuat justifikasi “eksploitasi” pusat (Jakarta) terhadap daerah.

b) Konflik Papua. Papua masuk ke wilayah Indonesia pada 1 Mei 1963 berdasarkan penjanjian yang ditandatangani antara Pemerintah Indonesia dengan Belanda di New York pada 15 Agustus 1962. Kedaulatan Indonesia atas Papua kembali ditegaskan lewat Pepera (Penentuan Pendapat Rakyat) yang berlangsung pada Juli-Agustus 1969. Konflik Papua timbul sebagai akibat rasa ketidakpuasan yang dimotori oleh OPM (Organisasi Papua Merdeka) yang berdiri tahun 1964. Aktivitas umum OPM adalah menyerang pos-pos polisi dan tentara, sabotase sarana vital dan strategis seperti Freeport, menyerang transmigran, atau penghasutan massa. Konflik Papua dapat dirunut sebagai berikut:

- (1) Kurang mulusnya pelaksanaan Pepera yang pernah diadakan Indonesia tatkala mengambil alih Papua dari Belanda.
- (2) Pelanggaran Hak Asasi Manusia, baik yang dilakukan pasukan Indonesia, utamanya dalam penegakan hukum atas mereka.

(3) Mengabaikan kebutuhan dan aspirasi masyarakat asli Papua, termasuk marginalisasi sosial ekonomi serta terbentuknya stereotip orang Papua (orang Papua “bodoh” dan “gemar mabuk”).

c) Konflik Maluku. Berbagai konflik vertikal di Maluku pada dasarnya merupakan rekayasa dari kelompok RMS yang masih eksis selama ini. Kerusuhan Ambon yang terjadi antara 1999-2004, dimanfaatkan RMS untuk menggalang dukungan dengan upaya-upaya provokasi, dan bertindak dengan mengatas-namakan rakyat Maluku. Pada tanggal 29 Juni 2007, beberapa elemen aktivis RMS berhasil menyusup masuk ke tengah upacara Hari Keluarga Nasional yang dihadiri oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, dengan kedok tarian Cakalele seusai Gubernur Maluku menyampaikan sambutan dan berhasil mengibarkan bendera RMS. Upaya-upaya penciptaan psikologis yang bersifat asimetris melalui pengibaran bendera RMS yang dipasang di antara bendera negara-negara yang berlaga pada kejuaraan dunia sepak bola di daerah kepulauan Saparua Ambon yang menggambarkan pesan terselubung sebagai upaya pemisahan diri dari Republik Indonesia.

2) Aksi teror. Aksi teror pada umumnya dilakukan kelompok tertentu yang eksklusif untuk memperjuangkan kepentingannya.

Beberapa aksi yang terjadi di Indonesia pada dasarnya bisa dimasukkan dalam kelompok aksi terorisme yang disebabkan karena rasa fanatik dalam memperjuangkan kepentingannya, antara lain:

- a) Kasus Woyla, pembajakan pesawat Garuda dalam penerbangan dari Palembang dan dipaksa menuju Bangkok, 28 Maret 1981.
  - b) Pengeboman Gereja pada malam Natal 2000 di Jakarta, Bekasi, Sukabumi, Bandung dan Medan.
  - c) Bom Bali di Legian Kuta 12 Oktober 2002, yang menewaskan hampir 200 orang wisatawan dan penduduk setempat.
  - d) Bom J.W. Marriot 5 Agustus 2003 yang mengakibatkan 12 orang tewas dan lebih dari 150 orang luka-luka.
  - e) Bom J.W. Marriot dan Ritz Carlton 17 Juli 2009 yang mengakibatkan 9 orang meninggal dan lebih dari 50 orang luka-luka.
- 3) Konflik sosial berlatar belakang SARA. Kemajemukan masyarakat Indonesia memungkinkan terjadinya Perang Internal Baru (*New Internal Warfare*) dikarenakan perbedaan pendapat antar kelompok masyarakat yang tidak berhasil diselesaikan, antara lain:

- a) Konflik Ambon. Konflik yang terjadi di Ambon berawal dari pertikaian antar 2 kelompok masyarakat yang berdampak luas terjadinya konflik antara masyarakat beragama Islam dan Kristen yang menimbulkan banyak korban baik jiwa maupun harta.
- b) Konflik Poso. Latar belakang konflik sosial di Poso menurut sebagian besar pengamat merupakan konflik horizontal antar agama, meskipun sebenarnya konflik tersebut tidaklah sesederhana itu, karena melibatkan persilangan antar etnik, baik lokal maupun pendatang dan kepentingan politik lokal.
- c) Konflik Kalimantan (Sampit). Kerusuhan etnis di Kalimantan Tengah yang berakar pada pelanggaran selama beberapa dekade atas hak-hak masyarakat adat serta pengrusakan besar-besaran sumber alam Propinsi mengakibatkan kerusuhan antar etnis yang diperkirakan menewaskan 500 orang dan menyebabkan 80.000 orang terpaksa meninggalkan rumah.

**b. Konflik Luar Negeri**

- 1) Philipina. Konflik yang terjadi di Philipina antara pemerintah dengan The Front Pembebasan Nasional Moro merupakan pemberontakan bersenjata dengan tujuan memisahkan diri dan membentuk negara baru di Mindanao dan pertama kali muncul pada awal tahun 1970.



2) Thailand. Konflik yang terjadi di Thailand Selatan antara pemerintah dengan Muslim Pattani sebagai dampak perjanjian antara Inggris dengan Thailand. Pattani dipaksa menjadi bagian dari kerajaan Siam (Thailand). Sejak itu terjadi pergolakan di daerah Pattani hingga sekarang.

3) Konflik Afghanistan. Konflik di Afghanistan terjadi antara Amerika Serikat dengan koalisinya berhadapan dengan kelompok Taliban yang mendapat julukan Teroris dunia. Dalam konflik tersebut Pasukan Koalisi AS dengan persenjataan yang modern berhadapan kelompok Taliban dengan menggunakan persenjataan seadanya yang diimprovisasi.

11. **Kesiapan TNI AD.** Sesuai Buku Revisi Tahap 1 Postur TNI AD tahun 2005-2024, dapat digambarkan secara garis besar postur TNI AD yang ada saat ini sebagai berikut:

a. **Kekuatan.** Satuan di lingkungan TNI AD yang dapat dikerahkan dalam menghadapi ancaman, sbb :

1) Organisasi

a) Kostrad. Terdiri dari 2 Divisi yaitu 6 Brigif (Brigade terdiri dari 3 Yonif), 2 Yonkav, 2 Kikavtai, 2 Menarmed (dengan total 6 Yonarmed), 2 Yonarhanudri, 2 Yonzipur, 1 Denintel, 2 Yonbekang, 2 Yonkes, 2 Kihub, 2 Denpal, 2 Kipom dan 2 Satajen.

- b) Kopassus. Terdiri dari 2 Grup Parako (masing-masing 2 Yon Parako), 1 Grup Sandha, dan 1 Satgultor.
  - c) Kodam. Kodam yang tergelar saat ini terdiri dari 13 Makodam, masing-masing Kodam memiliki Satpur, Satbanpur, Satbanmin dan Satuan Komando kewilayahan.
  - d) Penerbad. Satuan Penerbad yang tergelar saat ini terdiri dari 3 Skadron.
  - e) Psikologi. Satuan Psikologi yang dimiliki TNI AD adalah Dispsiad yang berlokasi di Jl. Sangkuring Bandung
- 2) Personel. Jumlah militer TNI AD sebanyak 314.111 orang yang tersebar di satuan seluruh Indonesia. Jumlah ini dihadapkan pada organisasi TNI AD (TOP/DSPP) masih belum terpenuhi 100%.

## 3) Materiil

MATERIIL	NYATA (PCK/UNIT/BTR)	BAIK	RB	RR
SENJATA RINGAN	163.825	139.448	3.459	20.918
RANPUR KAVALERI	1.016	170	125	721
MERIAM ARMED	359	131	66	162
RUDAL ARHANUD	70	19	50	1
MERIAM ARHANUD	389	48	58	283
SENJATA PENERBAD	100	67	30	3
PSWT UDARA	62	38	5	19

Data kondisi munisi MKK nyata 113.961.127 butir, secara umum baru terpenuhi 25,28 % dari kebutuhan bekal pokok. Sedangkan munisi MKB kondisi nyata 382.543 butir, secara umum baru terpenuhi 13,28 %.

## 4) Pangkalan.

a) Satpur. Kuantitas pangkalan sesuai TOP 95.254 unit, nyata 51.024 unit (34.374 kondisi baik), nilai dari kuantitas pangkalan Satpur adalah 54 %, sedangkan kualitas pangkalan yang ada adalah 67 %.

b) Satbanpur. Kuantitas pangkalan sesuai TOP 40.393 unit, nyata 17.376 unit (13.183 kondisi baik), nilai dari kuantitas pangkalan Satbanpur adalah 43 %, sedangkan kualitas pangkalan yang ada adalah 76 %.

c) Satkowil. Kuantitas pangkalan sesuai TOP 26.803 unit, nyata 17.356 unit (13.486 kondisi baik), nilai dari kuantitas pangkalan Satkowil adalah 65 %, sedangkan kualitas pangkalan yang ada adalah 78 %.

5) Penak.

a) Bujuk. Peranti lunak yang dimiliki TNI AD sebanyak 628 naskah Doktrin terdiri dari 1 Naskah Doktrin TNI AD “Kartika Eka Paksi”, 34 naskah Bujukin, 36 naskah Bujukbin, 18 naskah Bujukops, 137 naskah Bujukmin, 103 naskah Bujuklap dan 299 naskah Bujuknik, yang bersifat naskah Sementara 190 naskah dan yang bersifat naskah Tetap 271 naskah dan 187 Bujuklak terdiri dari 94 BPUP 1 s.d. 7, 94 BPKU 1 s.d. 7, 32 BP3 UTP U/J, 6 SJM, 15 UST, 1 Buku Bertempur Secara Benar, 1 Buku Saku HAM, 1 Stratifikasi Doktrin, 1 Pokok-pokok Perang Darat, 1 Kamus Istilah Militer, 1 Standarisasi Doktrin, 1 SJM Induk, 59 BPKJ dan 59 BPKKJ, 1 Binsat, 1 Garlat Pratugas Operasi di Daerah Rawan, 2 Doktrin Musuh, 1 Penataran, 1 Manajemen Operasi, dan 4 judul buku Proglatsi.

b) Peraturan Perundang-undangan. UU Nomor 26 Tahun 1999 tentang Pencabutan UU Nomor 11/PNPS/Tahun 1963 tentang Pemberantasan Kegiatan Subversi, UU Nomor 27 Tahun 1999 tentang Perubahan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang Berkaitan dengan Kejahatan Terhadap Keamanan Negara, UU Nomor 56 Tahun 1999 tentang Rakyat Terlatih, UU Nomor 29 Tahun 1999

tentang Pengesahan Internasional Convention on the Elimination of form of Racial Discrimination 1965 (Konvensi Internasional tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial 1965), UU Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian sengketa, UU Nomor 39 tentang Hak Asasi Manusia, Perpu Nomor 1 Tahun 1999 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia,

c) Peraturan lainnya

(1) Peraturan Presiden. Instruksi Presiden R.I Nomor 2 Tahun 1999 tentang Langkah-langkah Kebijakan Dalam Rangka Pemisahan Kepolisian Negara Republik Indonesia dari Angkatan Bersenjata Republik Indonesia.

(2) Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/1/I/2003 tanggal 24 Januari 2003 tentang Wewenang Pemberian Keterangan Pers di Jajaran TNI, Kep/6/X/2003 tanggal 20 Oktober 2003 tentang Nama, Tempat Kedudukan dan Daerah Hukum Peradilan Militer, Pengadilan Militer Tinggi dan Pengadilan Militer Pertempuran serta Oditur Militer, Kep/1/IX/2003 tanggal 23 September 2003 tentang Ketentuan Biaya Perjalanan Dinas Dalam Negeri di lingkungan Unit Organisasi Mabes TNI, Perpang/10/VI/2007 tanggal 21 Juni 2007 Buku Juk Ops NTI tentang Operasi Bantuan, Perpang/13/VII/2007 tanggal 11 Juli 2007

Bujuklak TNI tentang Operasi Pengamanan Perbatasan, Perpang/23/IX/2007 tanggal 17 September 2007 Bujuklap TNI tentang Pengamanan Presiden, Wakil Presiden dan tamu Negara setingkat Kepala Negara/Kepala Pemerintahan beserta keluarganya, Kep/2/I/2007 tentang Doktrin TNI Tri Dharma Eka Karma, Perpang/5/II/2008 tanggal 11 Pebruari 2008 tentang persetujuan dan pengesahan pelaksanaan Validasi organisasi Kodam, Korem, Kodim, Koramil, Doharsista Arhanud dan Kukostrad. Perpang 9/II/2008 tanggal 18 Februari 2008 tentang Naskah Sementara Buku Petunjuk Dasar Penggunaan kekuatan TNI, Perpang/14/III/2008 tanggal 27 Maret 2008 tentang Naskah Sementara Buku Petunjuk Induk Operasi Militer Selain Perang, Perpang/15/IV/2008 tanggal 4 April 2008 Naskah Sementara Buku Petunjuk TNI tentang Kampanye Militer, Perpang /43/VII/ 2008 tanggal 11 Juli 2008 Naskah Sementara Bujuk Ops TNI tentang operasi mengatasi Gerakan Separatis Bersenjata, Perpang 59/X/2008 tanggal 17 Oktober 2008 tentang Jukmin Penggunaan Prajurit TNI.

**b. Kemampuan.**

1) Kemampuan Intelijen.

a) Kemampuan penyelidikan. TNI AD mampu melaksanakan deteksi dini dan cegah dini telah dimiliki oleh satuan Intelijen pada semua tingkat komando.

b) Kemampuan pengamanan. TNI AD mampu melaksanakan pengamanan dalam rangka pengamanan personel, materiil, berita, dokumen, kegiatan militer, operasi dan obyek vital nasional yang bersifat strategis serta pengamanan terhadap pejabat VVIP dan VIP seperti Presiden, Wakil Presiden dan tamu negara setingkat kepala negara/wakil kepala negara.

c) Kemampuan penggalangan. Kemampuan melaksanakan penggalangan dan pembentukan opini dalam rangka menciptakan kondisi yang dikehendaki untuk kepentingan TNI dan TNI AD telah dimiliki secara terbatas oleh satuan Intelijen pada setiap tingkat komando.

2) Kemampuan Tempur.

a) Mampu melaksanakan tugas tempur strategis sebagai pasukan pemukul maupun kerangka yang dapat dikerahkan sewaktu-waktu.

- b) Mampu menyelenggarakan Operasi Khusus untuk melaksanakan Operasi khusus yang bersifat strategis. TNI AD memiliki satuan komando, satuan Sandi Yudha.
  - c) Mampu menyelenggarakan perlawanan wilayah darat, mencegah infiltrasi, menahan, melokalisir dan menggagalkan serbuan lawan secara terbatas, sampai dengan perang berlarut.
  - d) Mampu melaksanakan Pernika secara terbatas guna menjamin terselenggaranya komando dan pengendalian, disamping mencegah dan meniadakan gangguan elektronika lawan secara terbatas.
  - e) Mampu menyelenggarakan pertahanan udara terbatas dalam rangka melindungi instalasi strategis dari kemungkinan ancaman serangan udara lawan.
  - f) Mampu melaksanakan perang Nubika secara terbatas dalam rangka kemungkinan serangan lawan.
- 3) Kemampuan Teritorial.
- a) Mampu melaksanakan temu cepat dan lapor cepat tentang kejadian di wilayah.
  - b) Mampu menyelenggarakan manajemen teritorial di daerah.
  - c) Mampu melaksanakan penguasaan wilayah.



d) Mampu melaksanakan pembinaan terhadap masyarakat yang diarahkan pada penyiapan dan penyelenggaraan perlawanan rakyat di wilayah dalam rangka menjaga kedaulatan dan keutuhan wilayah NKRI.

e) Mampu menyelenggarakan Komunikasi Sosial dengan seluruh aparaturnya dan komponen bangsa.

4) Kemampuan dukungan.

a) K4I. Kemampuan menyelenggarakan Komando, Kendali, Komunikasi, Komputerisasi dan Informasi (K4I).

b) Administrasi. Mampu menyelenggarakan dukungan administrasi meliputi personel dan administrasi umum dalam menjamin pelaksanaan pembinaan dan penggunaan kekuatan secara berlanjut, terpadu, terarah, efektif dan efisien dalam suatu keutuhan sistem.

c) Kemampuan diplomasi militer yang bersifat pencegahan dengan melakukan kerjasama di bidang pendidikan, pelatihan, operasi bersama, kunjungan dan kerjasama industri pertahanan dalam rangka mencegah keinginan permusuhan dari negara lain.

d) Kemampuan untuk menguasai perkembangan teknologi industri militer disiapkan untuk membangun kewaspadaan sehingga TNI AD dapat menentukan kebijakan pembangunan kekuatan materiil/alutsista dan perlengkapan militernya serta menyesuaikan doktrin.

e) Kemampuan manajemen disiapkan untuk melaksanakan kegiatan organisasi secara teratur serta menggunakan mekanisme dan prosedur baku untuk menghilangkan keragu-raguan dalam mengambil tindakan yang efisien, efektif, tepat, dan terukur.

f) Kemampuan dalam menyelenggarakan K4I disiapkan untuk melaksanakan setiap kegiatan, khususnya kegiatan operasional dalam rangka mengendalikan kegiatan sesuai dengan rencana dan dinamika yang terjadi.

g) Kemampuan untuk melaksanakan operasi bantuan kemanusiaan dan bantuan penanggulangan akibat bencana alam.

h) Kemampuan untuk melaksanakan bantuan kepada Pemda dan Polri.

**c. Gelar.**

1) Terpusat.

a) Makostrad di Jakarta.

- (1) Madivif I di Cilodong, terdiri dari 2 Brigade Linud di Cijantung dan Makasar, 1 Brigade Infanteri di Tasikmalaya dan Satbanpur lainnya yang berada di sekitar Jakarta dan Jawa Barat.
  - (2) Madivif II di Malang, terdiri dari 1 Brigade Linud di Malang, 2 Brigade Infanteri di Solo dan Jember serta Satbanpur lainnya yang berada di Jawa Tengah dan Jawa Timur.
- b) Makopassus di Jakarta.
- (1) Grup I/Parako, Yon 11,12, 13 di Serang Jabar.
  - (2) Grup II/Parako, Yon 21, 22 di Kartosuro Jateng dan Yon 23 di Semplak Bogor.
  - (3) Grup III/Sandha, Yon 31, 32, 33 di Cijantung Jakarta.
  - (4) Satgultor di Cijantung Jakarta.
  - (5) Pusedik Passus di Batujajar Bandung.
  - (6) Yonaksus, Yonban dan Dennik di Cijantung Jakarta.

c) Penerbad.

- (1) Pus Penerbad di Jakarta
- (2) Skadron 11 di Semarang
- (3) Skadron 21 di Jakarta
- (4) Skadron 31 Semarang
- (5) Skadron 12 di Waytuba Baturaja dalam proses pembentukan

2) Kewilayahan. Ada 13 Kodam yang tergelar di seluruh wilayah Indonesia : Makodam I/BB di Medan, Kodam II/SWJ di Palembang, Kodam III/SLW di Bandung, Kodam IV/DIP di Semarang, Kodam V/BRW di Surabaya, Kodam VI/MLW di Balikpapan, Kodam VII/WRB di Makasar, Kodam IX/UDY di Denpasar, Kodam XII/TPR di Pontianak, Kodam XVI/PTM di Ambon, Kodam XVII/CEND di Jayapura, Kodam Jaya di Jakarta, Kodam IM di Banda Aceh.

## **BAB-IV**

### **ANALISA**

12. **Umum.** Dari semua data yang sudah diperoleh selanjutnya dilakukan analisa berbagai konflik yang terjadi untuk menentukan kemungkinan ancaman asimetris yang terjadi di Indonesia serta tingkat kesiapan TNI AD dalam menghadapi ancaman tersebut.

13. **Timbulnya Ancaman Asimetris.** Istilah asimetris telah muncul setidaknya pada tahun 1970an, meskipun asimetris sebagai konsep dalam peperangan modern secara resmi muncul pada tahun 1995, yang tertuang di *Joint Warfare of the Armed Forces of the United States.*” Definisi asimetris sampai saat ini masih merupakan persoalan untuk didefinisikan secara jelas. Namun sifat dari perang asimetris adalah berbeda dengan perang konvensional klasik dalam hal para pelakunya/kombatan menggunakan taktik, teknik dan senjata yang amat berbeda. Oleh karena itu, perang non konvensional, konflik intensitas rendah, perang gerilya, dan bahkan terorisme adalah kata-kata yang digunakan sebagai pengganti perang asimetris dan digunakan secara bergantian. Dalam kajian ini ditempatkan konterinsurjensi (COIN) yang memang diterima secara luas sebagai aspek *network-centric* dari asimetris. Secara singkat, aspek dasar dari asimetris atau perang non konvensional didasarkan pada pendekatan tidak langsung, kerahasiaan, kejutan, berlarut, kesabaran, yang bertujuan untuk melemahkan kemauan bertempur lawan dengan menunjukkan bahwa untuk melanjutkan peperangan

maka akan membutuhkan biaya yang lebih besar dibanding mengakhirinya.<sup>2</sup> Dari perspektif ini maka perang asimetris adalah konflik antara negara dan aktor non negara. Namun, dalam konteks dalam negeri, perang asimetris adalah konflik antara pemerintah, di dalamnya termasuk TNI, lawan terorisme dan insurjensi yang muncul dari dalam negeri.

Usulan definisi tentang asimetris seperti di atas tampak sesuai dengan apa yang sudah dihadapi oleh pemerintah Indonesia sejak awal kemerdekaan, dan bahkan sebelum kemerdekaan. TNI sejak dalam era kolonial juga sudah mempraktekkan perang asimetris. Dengan alat dan senjata ala kadarnya hasil rampasan serta aneka senjata tajam bahkan bambu runcing, bersama dengan rakyat bahu membahu berjuang melawan penjajah yang telah bercokol di tanah air selama berabad abad. Menggunakan taktik gerilya karena disadari tidak mungkin kuat berhadapan langsung *head to head* dengan pasukan kolonial Belanda yang bersenjata lebih canggih. Menyerang manakala musuh lengah, dan menghilang manakala musuh tampak siap dan kuat. Oleh karena itu pertempuran cenderung tidak menentukan dan amat mungkin berlangsung dalam kurun waktu yang amat panjang. Hal ini disebut juga sebagai perang berlarut (*protracted war*).

---

<sup>2</sup> Caforio, Giuseppe, 2008, *Armed forces and conflict resolution: Socialological perspective*, Bingley:Emerald,15.

Dari definisi tersebut jelas Indonesia juga menghadapi ancaman asimetris yang amat mungkin muncul dari dalam negeri berupa terorisme dan insurjensi. Tidak saja Indonesia, ancaman asimetris yang menargetkan negara-negara modern serta angkatan bersenjataanya oleh lawan yang menolak untuk terlibat dalam perang modern yang konvensional masih merupakan masalah yang kritis sampai saat ini. Banyak ahli militer yang masih berupaya mencari cara bagaimana untuk merespon atau menghadapi lawan non konvensional (didalamnya termasuk segala bentuk terorisme dan insurjensi) yang mencoba melakukan perang total melawan segala aspek yang ada dalam negara serta sistem internasional. Masalah yang muncul adalah bagaimana menyesuaikan dan melatih kembali militer, dalam konteks Indonesia adalah TNI, dan TNI AD secara lebih khusus lagi, yang pada dasarnya dilatih dan diorganisir secara konvensional melawan taktik dan teknik yang secara terus menerus berubah secara non konvensional dari lawan yang berupa terorisme dan insurjensi.

**a. Dalam negeri.**

1) Konflik berlatar belakang kebijakan pemerintah. Konflik yang terjadi di dalam negeri pada umumnya dilatarbelakangi rasa kurang puas terhadap kebijakan pemerintah, sehingga menjadi peluang munculnya insurjensi yang mengarah pada gerakan separatisme. Konflik semacam ini telah beberapa kali terjadi di Indonesia dan TNI mendapat tugas untuk menyelesaikannya. Penyebab awal konflik ini selalu bersifat politik dan pada umumnya karena janji yang tak bisa dipenuhi

oleh pemerintah pusat dan perbedaan prioritas dalam mengalokasikan anggaran, serta perlakuan yang dirasakan diskriminatif terhadap daerah. Penyebab konflik lainnya adalah campur tangan asing yang ikut menciptakan konflik di dalam negeri. Konflik yang ada campur tangan asing dapat dirasakan dalam peristiwa konflik di Ambon dimana Belanda secara terbuka memberikan dukungan politiknya, konflik di Aceh yang mengembang secara drastis setelah para pemuda mendapat dukungan pelatihan dari Libya serta dukungan senjata dari luar negeri yang tidak bisa diidentifikasi asalnya, bahkan pada pemberontakan Permesta jelas sekali CIA yang ikut terlibat dengan mengirimkan pilotnya untuk mendukung gerakan pemberontak, sedangkan konflik di Papua faktor penyebab awal adalah proses dekolonisasi yang tak berjalan mulus, dan Belanda dengan sengaja mengulur waktu penyerahan Papua ke Indonesia karena berbagai pertimbangan Politik dan Ekonomi yang menyertainya.

Operasi militer yang dilakukan TNI pada umumnya adalah pengerahan pasukan secara cepat guna mengisolasi daerah pemberontakan agar tidak menjadi semakin luas. Misalnya untuk menumpas pemberontakan Permesta dilancarkan operasi gabungan dengan nama Merdeka, untuk menumpas pemberontakan RMS dilakukan operasi dengan pasukan ekspedisi dan operasi untuk membebaskan Papua dari cengkeraman Belanda diberi nama Operasi Trikora. Operasi militer yang dilaksanakan saat itu dapat dikatakan sukses,



namun demikian tugas-tugas yang terkait dan harus dilaksanakan pasca operasi militer yang merupakan tanggungjawab departemen terkait belum semuanya berjalan mulus. Misalnya proses rehabilitasi dan pembangunan kembali daerah konflik serta melanjutkan proses *nation building*. Apabila proses rehabilitasi dan *nation building* tidak dilaksanakan dengan tuntas maka kemungkinan akan timbulnya pemberontakan atau gerakan insurjensi baru.

a) Gerakan Aceh Merdeka. Pada awalnya pemberontakan di Aceh menamakan diri Darul Islam dan bertujuan mendirikan sebuah Republik Islam atas seluruh wilayah Indonesia. Pemberontakan dapat direndam setelah Soekarno memberi janji dan jaminan bahwa Aceh akan diberi status sebagai daerah istimewa dengan otonomi luas di bidang agama, hukum adat dan pendidikan, namun demikian karena bertahun-tahun janji tersebut tidak dapat terpenuhi, maka separatis di Aceh muncul kembali mulai 4 Desember 1976, yang mereka beri nama Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dan secara jelas berniat memisahkan diri dari Republik Indonesia dan akibatnya pemerintah kembali melakukan operasi penumpasan terhadap pemberontakan yang berakhir pada tahun 1983. Dalam dekade 1980-an, GAM menguat lagi, merasionalisasi status politiknya dan memperkuat sayap militer serta merubah nama menjadi Angkatan Gerakan Aceh Merdeka (AGAM). Dalam periode ini, 400 kader agama dikirim ke Libya

untuk latihan militer, sehingga pada tahun 1989, AGAM yang merasa cukup kuat untuk menyerang pemerintah Indonesia mulai menyerang pasukan pemerintah, warga sipil dan orang-orang yang dicurigai sebagai mata-mata pemerintah. Akhirnya pada 2005 konflik di Aceh dapat selesai secara damai.

b) Operasi Papua Merdeka. Hal yang sama juga terjadi di Papua. Pasca Operasi Trikora, gejolak politik dalam negeri mengakibatkan perhatian terhadap Papua menjadi kurang. Beberapa program pemerintah yang dimaksudkan untuk mempercepat proses pembangunan di Papua seperti halnya Transmigrasi asal Jawa, Sulawesi dan Nusantara ternyata membawa dampak negatif, seperti halnya rasa cemburu dan diskriminasi antara penduduk asli dan penduduk pendatang. Pada 7 Desember 2000, pasukan OPM yang dipimpin Mathias Wenda menyerang Polsek Abepura 10 kilometer dari Jayapura, sebelumnya OPM telah sering terlibat dalam gerakan teror terhadap masyarakat sipil dalam bentuk penculikan, pembunuhan, penganiayaan, dan pembakaran permukiman atau tanah pertanian. Pemerintah pusat menyebut OPM sebagai gerakan pengacau keamanan (GPK) yang aksinya sekadar kriminal, namun sebaliknya OPM sendiri melihat aksinya sebagai satu-satunya cara untuk mencapai kemerdekaan Papua. Banyak warga Papua Barat lebih bersimpati pada pemerintah kolonial Belanda karena pada akhir 1950-

1960an Belanda membanjirkan banyak dana ke wilayah Papua untuk membuat para elite politik Papua Barat merasa nyaman. Mengacu kepada permasalahan tersebut saat ini pemerintah RI juga memanfaatkan otonomi daerah untuk mengajak elite Papua membangun dengan memberikan dana yang besar serta dukungan sumber daya manusia.

Perang yang dilakukan oleh GAM maupun Kelompok Papua (OPM) bertujuan untuk memisahkan diri dari pemerintahan yang sah dengan menggunakan taktik dan teknik perang gerilya dengan aktornya adalah nonstate sehingga konflik yang terjadi di Aceh maupun Papua bila tak diwaspadai akan tetap merupakan ancaman asimetris bagi bangsa Indonesia. Meskipun demikian, tampak bahwa berbagai penyebabnya adalah masalah politik yang tidak tuntas dan militer harus menyelesaikan sepanjang masih merupakan ancaman militer dan ancaman bersenjata, TNI wajib menyelesaikan dari segala sisi pendekatan yang dapat dilaksanakan.

2) Aksi Terorisme. Terorisme pada dasarnya bukanlah persoalan para pelaku teror. Terorisme lebih terkait pada keyakinan ideologis. Berbagai kejadian dan penangkapan teroris akhir-akhir ini tidak akan berakhir sepanjang keyakinan yang menyertainya masih melekat. Sejarah membuktikan, meskipun teroris berhasil dilumpuhkan di Don Muang, pelaku bom Bali berhasil ditangkap, Dr Azhari

ditembak dan Nurdin M.Top juga tertembak, namun selama ajarannya masih melekat, selama itu pula ancaman teroris masih tetap ada. Berbagai peristiwa yang terjadi, sesungguhnya dengan jelas menunjukkan bahwa terorisme merupakan gerakan transnasional. Hubungan antar pelaku biasanya sangat dekat, kekeluargaan atau karena pengalaman bersama yang dilandasi oleh keyakinan yang kuat terhadap ajarannya. Hubungan ini juga nampak dalam pelatihan, dukungan finansial dan logistik. Tampak pula bahwa organisasi teror yang berkembang saat ini tidak selalu mengikuti garis komando yang tegas. Strukturnya bahkan nampak terdesentralisasi sehingga dapat bekerja dengan cepat menyesuaikan dengan perubahan serta kesalahan yang diperbuat dan melakukan perbaikan seperlunya tanpa harus menunggu perintah dari pusat.

Mengacu pada berbagai kejadian di masa lalu, serta melihat struktur organisasi teroris yang fleksibel, maka penumpasan terhadap terorisme sesungguhnya bukanlah dengan menghancurkan markas besarnya, atau menghancurkan tokoh karismatiknya, karena kematian tokoh dalam waktu singkat akan segera digantikan tokoh lainnya. Peranan intelijen dalam memutuskan hubungan antara sel lokal dengan sel internasional sangat sentral karena para pelaku atau teroris internasional sangat lihai memanfaatkan gerakan perlawanan lokal untuk kepentingannya. Misal hubungan Jamaah Islamiah dengan Al Qaidah yang longgar

dan hanya mendukung ideologi saja, disini tidak terlihat secara nyata dukungan peralatan atau keuangan untuk menjalankan operasi terorisme dalam skala lokal. Saat ini meskipun secara organisasi Jamaah Islamiah telah hancur, namun kemungkinan bangkitnya kembali ajaran yang dianutnya merupakan sesuatu yang sangat memungkinkan. Disinilah sesungguhnya peran Pembinaan Teritorial dan operasi penggalangan oleh Satuan Kewilayahan menjadi sangat signifikan. Kegagalan membaca suara hati masyarakat dalam wilayah binaannya akan membawa konsekuensi luas dan fatal.

3) Konflik sosial antar kelompok masyarakat. Konflik sosial antar kelompok masyarakat pada dasarnya disebabkan oleh perbedaan agama, etnis, ras atau golongan.

a) Konflik Ambon. Konflik yang terjadi di Ambon merupakan konflik antara masyarakat beragama Islam dan Kristen yang menimbulkan banyak kerugian harta dan benda serta mengakibatkan lebih dari 1000 orang meninggal dunia. Dalam literatur politik disebut konflik komunal, namun dalam dokumen resmi disebut konflik horisontal. Konflik seperti ini sangat marak di seluruh penjuru dunia seusai perang dingin. Meskipun dalam konflik ini dimensi agama sangat menonjol, namun konflik ini sesungguhnya sangat kompleks dengan berbagai faktor turut memberikan kontribusi sebagai penyebab. Salah satu penyebab adalah politisasi birokrasi di masa kolonial

yang berlanjut di bawah orde baru dan mendapatkan momentum penyaluran dalam situasi politik yang kacau seusai tumbangnya orde baru. Selain itu adalah hilangnya nilai-nilai luhur seperti *pelagandong* serta keterlibatan elite lokal sebagai provokator.

Selama konflik masyarakat Ambon diliputi kebingungan karena banyaknya orang tak dikenal yang terlibat konflik, kerusuhan di berbagai daerah diwarnai pola penyerangan yang sistematis, kerusuhan diperhebat dengan munculnya isu tentang Front Kedaulatan Maluku dan RMS, Laskar Kristus, Laskar Jihad serta isu pemaksaan agama. Konflik yang awalnya berlangsung di Ambon meluas ke Maluku Utara meskipun tetap membawa identitas agama, namun terpicu juga persaingan etnis Kao-Makian berkaitan pembentukan Kecamatan Malifut.

Menyikapi hal ini, Presiden memberlakukan Pemerintahan Darurat Sipil (PDS) dan berhasil mengakhiri konflik dengan memberikan peran lebih besar kepada TNI untuk menurunkan eskalasi konflik. Walaupun segala upaya telah dilakukan guna mengatasi konflik horizontal di Wilayah Maluku dan Maluku utara namun masih ada indikasi kuat adanya ancaman asimetris berupa konflik vertikal setelah muncul ancaman dari masyarakat Maluku yang masih menghendaki berdirinya Republik Maluku Selatan (RMS) terutama warga asal Maluku yang berada di

perantauan (Nederland), yang eksis memperjuangkan berdirinya Republik Maluku Selatan.

b) Konflik Poso. Konflik sosial di Poso merupakan konflik horizontal antar agama, meskipun sebenarnya konflik tersebut tidaklah sederhana itu, karena melibatkan juga persaingan antar etnik, baik lokal maupun pendatang dan kepentingan politik dan ekonomi lokal. Dalam peristiwa konflik di Poso tidak ada faktor struktural sebagai penyebab konflik, yang ada dimensi luas, diantaranya pergesekan berbasis identitas primordial. Konflik Poso dapat menjadi endemik dan sewaktu-waktu muncul kembali apabila tidak diantisipasi dengan baik.

c) Konflik Kerusuhan etnis di Kalimantan Tengah. Konflik yang terjadi merupakan konflik yang berakar pada pelanggaran selama beberapa dekade atas hak-hak masyarakat adat serta pengrusakan besar-besaran sumber alam di propinsi Kalimantan Tengah yang menimbulkan kesenjangan sosial luar biasa. Kerusuhan tersebut menewaskan  $\pm$  500 orang dan 800 orang terpaksa meninggalkan rumah. Penyebab konflik yang terjadi secara makro adalah ketidakpuasan perilaku antar suku, agama, birokrasi, penguasaan aset dan lapangan pekerjaan, tidak ditemukannya solusi secara terbuka yang saling mengalah dan saling menguntungkan serta lemah dalam menganalisis provokasi yang datang dari luar. Sedangkan penyebab konflik secara mikro adalah

perbedaan budaya, persaingan yang tak seimbang, premanisme, kebijakan pemerintah pusat yang sentralistik, struktur sosial ekonomi yang tak wajar, serta ketidak-erdayaan aparat penegak hukum. Hal ini mengakibatkan terjadinya akumulasi “tekanan” secara mental, spiritual, politik sosial, budaya dan ekonomi yang dirasakan oleh sebagian masyarakat lokal.

Ketidakharmonisan dalam interaksi sosial antar etnis yang beragam perlu mendapatkan penanganan yang adil dan tidak berpihak. Pertikaian antar-etnis yang mengakibatkan hancurnya puluhan gubuk di kamp pengungsian warga salah satu etnik menunjukkan bahwa pemerintah tidak menggunakan metode preventif dengan memberdayakan adat istiadat warga setempat *ulu bakas* atau persekutuan adat. Konflik horizontal timbul karena kurangnya penghargaan terhadap nilai sosial budaya masyarakat yang ada dan didukung oleh kesenjangan sosial yang terjadi antara pendatang dan masyarakat lokal, keberpihakan aparat penegak hukum pada salah satu kelompok etnis/agama sehingga konflik terus berulang terjadi walaupun telah dilakukan upaya perdamaian.

Pembinaan Teritorial yang harus dilaksanakan mulai tingkat Kodam sampai dengan tingkat Babinsa pada daerah-daerah seperti ini sangat signifikan. Apabila keadaan sosial masyarakat sudah terlanjur memburuk dan menjurus kearah konflik maka bantuan dari pusat untuk



melakukan penggalangan menjadi sangat diperlukan. Aturan yang membatasi keterlibatan TNI AD dalam menangani konflik seperti ini harus menjadi perhatian seluruh pihak, agar penyelesaian permasalahan pada tahap awal dapat dilakukan secara optimal karena kegagalan menemukan solusi secara dini akan membawa konsekuensi luas pada masyarakat

**b. Luar Negeri.**

1) Konflik yang terjadi di Philipina dan Thailand. Terjadi antara kelompok Moro maupun kelompok Pattani dengan pasukan pemerintah yang bertujuan untuk memisahkan diri dan membentuk pemerintahan lain. Konflik berawal dari adanya kepentingan otonomi oleh Pattani tersebut yang tidak terpenuhi oleh pemerintah yang sah, apabila dilihat dari latar belakang permasalahan yang terjadi, maka konflik tersebut pernah terjadi di Indonesia yaitu antara GAM dengan TNI serta antara kelompok OPM dengan TNI. Dengan pemberlakuan otonomi daerah membawa segi positif dan negatif bagi penyelenggaraan pemerintah. Dari segi positif otonomi dapat mempercepat laju perkembangan ekonomi daerah dan dari segi negatif adalah berkembangnya egosentris kedaerahan yang dapat menjadi pemicu terjadinya konflik seperti di Philipina dan Thailand. Hal tersebut menandakan bahwa ancaman tersebut dapat senantiasa terjadi di mana saja.

Perang yang terjadi antara kelompok-kelompok dengan pasukan pemerintah yang sah menggunakan berbagai strategi dan taktik yang dilakukan dengan tujuan memenangkan perang. Hal tersebut menunjukkan dipergunakan cara-cara perang asimetris sehingga bukan tidak mungkin pola seperti ini masih akan berulang di masa depan dan merambah sampai Indonesia.

2) Konflik di Afganistan. Terjadi antara pasukan AS dengan kelompok Taliban dan awal lahirnya teroris Al Qaeda yang melanda hampir di seluruh dunia. Kelompok Taliban dengan persenjataan yang minim melawan pasukan AS dan sekutunya yang didukung persenjataan yang modern. Kondisi tersebut mengingatkan kita akan awal terjadinya perang asimetris yang berbeda kekuatan dan menggunakan segala cara. Kemampuan propaganda yang luar biasa dari Al Qaeda dengan membawa sentimen keagamaan membuat pihak yang lemah berhasil menarik simpati masyarakat di perbatasan Pakistan, bahkan dari berbagai penjuru dunia lainnya. Kehadiran para pejuang yang didasari niat murni keagamaan ini tak disadari dimanfaatkan dengan lihai oleh Al Qaeda untuk memberikan doktrin perjuangan mengalahkan AS serta sekutunya. Pengaruh Al Qaeda terhadap masyarakat perbatasan Pakistan dan simpatisan masyarakat dipenjuru dunia, telah membuat mereka bertekad bulat untuk melanjutkan perjuangannya dengan cara berbeda mulai dari pengumpulan dana, menyebarkan doktrin hingga terlibat aksi

terorisme. Hal ini dikarenakan kepentingan keagamaan atau doktrin yang sudah tertanam lebih kuat dari pada paham kebangsaan.

Peran Kodam melalui Pembinaan Teritorial pada daerah-daerah yang warganya pernah mengikuti pendidikan/pelatihan mental dan militer di Afganistan menjadi sangat krusial dan harus dilakukan sedini mungkin karena bila paham sudah terlanjur menyebarkan, maka diperlukan suatu operasi cukup besar untuk melakukan penggalangan atau merangkul mereka kembali. Aturan yang membatasi keterlibatan TNI AD dalam upaya penggalangan seperti ini harus lebih dipertegas, sehingga penyelesaian permasalahan dapat dilakukan secara profesional dan paham fanatisme tidak sempat berkembang secara luas menjadi paham terorisme di Indonesia.

c. **Ancaman Asimetris di Indonesia.** Dari penjelasan di atas dapat diartikan bahwa ancaman yang terjadi di dalam negeri (separatisme, Konflik Horizontal) dan luar negeri seperti konflik di Filipina, Thailand dan Afganistan serta kegiatan terorisme yang terjadi di Indonesia selama ini, merupakan ancaman terhadap NKRI, bila konflik tersebut terjadi secara simultan dan berkelanjutan akan menimbulkan bentuk ancaman asimetris.

1) Ancaman asimetris yang dihadapi TNI AD yang dapat membahayakan kedaulatan negara berupa Separatis seperti yang pernah terjadi di Aceh dan Papua.

2) Ancaman asimetris yang dihadapi TNI AD yang dapat membahayakan keutuhan wilayah negara yang diakibatkan oleh pengaruh instabilitas keamanan nasional yang disebabkan kegiatan terorisme.

3) Ancaman asimetris yang dihadapi TNI AD yang dapat membahayakan keselamatan hidup bangsa Indonesia berupa Konflik Horizontal seperti yang pernah terjadi di Ambon, Poso dan Sampit.

#### 14. **Kesiapan TNI AD.**

##### a. **Kekuatan.**

1) Organisasi. Saat ini TNI AD memiliki kekuatan seperti Kostrad, Kopassus Balakpus dan Kodam beserta jajarannya yang tersebar diseluruh wilayah Indonesia. Dalam menghadapi perkembangan ancaman yang terjadi, TNI AD telah membentuk dan menghidupkan kembali Kodam Iskandar Muda, Kodam XVI/Ptm, beberapa Korem, Kodim dan beberapa Brigade pada tahun 2002 serta Kodam VI/Mulawarman pada tahun 2010. Pengembangan dan penghidupan kembali beberapa satuan tersebut dimaksudkan untuk mempersempit ruang gerak dan sekaligus meningkatkan daya tangkal terhadap ancaman asimetris. Ditinjau dari kesiapan organisasi TNI AD bila dihadapkan pada ancaman asimetris saat ini, maka TNI AD masih sangat memungkinkan untuk menghadapinya dengan prediksi menghadapi beberapa kejadian *trouble spot* di tanah air. Hal

tersebut dapat dilihat dari gelar satuan-satuan Balahanwil maupun Balahanpus.

Organisasi TNI AD yang disusun secara terpusat dan kewilayahan dengan struktur yang sangat fleksibel baik dari tingkat regu sampai dengan tingkat Divisi Infanteri pada dasarnya pengerahan satuan TNI AD selalu mempertimbangkan kemampuan lawan untuk mendapatkan efektifitas dan efisiensi pelaksanaan operasi.

Organisasi TNI AD saat ini belum sepenuhnya mampu mendeteksi lawan baik bentuk operasinya, kekuatannya maupun kedudukannya, hal ini sebagai akibat lemahnya kemampuan intelijen. Pada satuan setingkat Korem yang sudah mampu melaksanakan operasi berdiri sendiri, saat ini satuan setingkat Korem hanya dilengkapi satuan tim intel yang memiliki kemampuan intel dasar, sehingga informasi yang diberikan kepada komandan Korem selalu data awal yang belum dianalisa.

Seyogyanya satuan tingkat Korem telah memiliki personel perwira yang mempunyai pengetahuan intelijen lanjutan. Dihadapkan dengan perkembangan ancaman asimetris yang semakin dinamis dan agresif maka Babinsa yang mempunyai wilayah tanggung jawab sangat luas perlu dipertimbangkan dan ditata kembali, khususnya Babinsa yang semula mempunyai tanggung jawab lebih dari 1 desa bahkan ada yang sampai 3 desa perlu diadakan reorganisasi. Seyogyanya 1

Babinsa cukup menguasai 1 desa dengan tugas dan tanggung jawab sebagai informan, pembina desa dan sebagai Bapul.

2) Personel. Secara umum personel satuan tempur, satuan bantuan tempur dan satuan bantuan administrasi serta satuan teritorial yang ada di jajaran TNI AD saat ini telah mencapai rata-rata 70 s/d 90 % dengan kualitas mempunyai kemampuan untuk menghadapi ancaman asimetris. Mengingat kebijakan tentang personel tidak ada perubahan dari jumlah yang ada secara keseluruhan di jajaran TNI AD maka untuk memenuhi kebutuhan MEF (maximum essential force) perlu adanya strategi pemenuhan personel Satpur dan Satbanpur agar mencapai 100% TOP/DSPP, sedangkan untuk Satbanmin dilakukan kebijakan padat teknologi. Dengan demikian pemenuhan kebutuhan personel di satuan jajaran TNI AD khususnya untuk memelihara kesiapan operasional dalam menghadapi ancaman asimetris perlu diikuti dengan peningkatan pengetahuan dan keterampilan prajurit sesuai bidang.

3) Materiil.

a) Kualitas ancaman asimetris semakin hari semakin tajam, hal ini diperkuat karena lawan memiliki sistem komunikasi yang canggih dan modern bahkan berbasis satelit yang belum digunakan oleh satuan TNI AD, sehingga untuk mengatasi hal tersebut diperlukan satuan yang memiliki kemampuan penguasaan teknologi satelit

dalam bidang sistem komunikasi yang dapat menanggulangi kecanggihan system komunikasi lawan.

b) Pada umumnya satuan-satuan jajaran TNI AD sudah dilengkapi dengan materiil sesuai dengan TOP/DSPP, namun materiil tersebut rata-rata sudah melampaui batas usia pakai. Dihadapkan pada ancaman asimetris yang mungkin timbul di Indonesia kekurangan akan materiil satuan semakin menjadi masalah yang urgen untuk diatasi, terutama kebutuhan akan materiil khusus pada satuan intelijen dan satuan anti teror. Satuan intelijen dan satuan penanggulangan terorisme idealnya dilengkapi dengan senjata dan alat komunikasi untuk operasi penanggulangan teror. Saat ini satuan-satuan yang telah dilengkapi dengan senjata dan Alkapsus/Almatsus anti teror hanya di satuan intelijen BIN dan BAIS serta Detasemen 81 Kopassus sebagai satuan penanggulangan teror yang sudah dilengkapi dengan perlengkapan khususnya, sedangkan satuan intelijen Kowil dan satgultor yang ada di Batalyon-batalyon Raider belum dilengkapi dengan materiil penanggulangan teror secara optimal.

c) Pada satuan intelijen, alat peralatan terutama material khusus (matsus) dan alat komunikasi khusus (alkomsus) merupakan perlengkapan utama aparat intelijen didalam melaksanakan tugas-tugasnya. Matsus dan alkomsus yang dimiliki satuan intelijen satuan Kowil saat ini merupakan hasil pengadaan tahun 1990 yang

kondisinya sudah ketinggalan teknologi. Apalagi bila dioperasionalkan sering mengalami kerusakan dan bahkan tidak dapat digunakan lagi. Matsus dan alkomsus tersebut masih belum memadai bila dihadapkan dengan perkembangan teknologi yang semakin modern dan gerakan pelaku ancaman asimetris yang kualitasnya semakin tinggi. Kondisi ini akan mempengaruhi kinerja personel intelijen di lapangan yang akan berhadapan dengan kelompok pelaku ancaman asimetris yang sebagian besar memiliki pengetahuan dan teknologi yang baik. Hal ini sangat mungkin karena mereka mempersiapkan diri baik secara pengetahuan maupun keterampilan dan keahlian di bidang teknis, komunikasi, merakit bom dan senjata. Pada satuan Gultor yang ada di Batalyon Raider saat ini belum dilengkapi dengan materiil penanggulangan terror secara optimal bila dihadapkan dengan gerakan terorisme yang mobilitas dan militansinya semakin tinggi. Teroris saat ini sudah tidak pandang bulu untuk membunuh siapa saja yang menghalangi tujuannya. Mereka juga mudah untuk pindah dari suatu tempat ke tempat yang lain dengan menyelim bersama masyarakat. Matsus dan alkomsus yang diperlukan satuan anti teror (Den 81 dan Satuan Raider) dalam pelaksanaan tugas sesuai perkembangan teknologi saat ini dalam rangka mengatasi aksi terorisme, diantaranya :



- (1) Alat penyadap yang dapat menangkap pemancar radio dan alat jeming.
  - (2) Alat perekam gambar (visual optik) seperti kamera digital misi yang dapat digunakan untuk merekam secara tersembunyi.
  - (3) Alat komunikasi yang diantaranya peralatan GSM Intercept dan laser monitoring.
  - (4) Sarana komputer dan internet untuk dapat mengakses informasi baik dari dalam maupun luar negeri secara cepat sehingga dapat dijadikan sebagai bahan informasi tambahan.
  - (5) Alkomsus berbasis satelit yang dapat mendukung terselenggaranya komunikasi diseluruh wilayah Indonesia.
  - (6) Kendaraan (mobil dan motor) guna mempercepat mobilitas pasukan.
  - (7) Alat komunikasi khusus yang dapat digunakan antar personel penanggulangan teroris.
- c) Pada satuan pengamanan terhadap bahaya serangan Nubika saat ini masih terbatas pada satuan kompi Nubika yang berada di Ditziad, berada di wilayah agar dapat menjangkau wilayah yang jauh dari jangkauan satuan Kompi Nubika yang berada di pusat.

4) Pangkalan. Satuan penanggulangan terhadap ancaman asimetris sangat membutuhkan mobilitas yang tinggi dan kecepatan dalam penindakan sehingga perlu adanya pemusatan pasukan dalam satu lokasi, kondisi tersebut memerlukan sarana dan prasarana yang memadai untuk melatih kecepatan satuan, transportasi yang dapat bergerak disegala medan dan cuaca, sehingga diperlukan pangkalan yang sedemikian rupa sehingga memudahkan bagi prajurit untuk berkumpul, briefing/menerima perintah untuk siap digerakkan sewaktu-waktu. Kenyataan yang kita hadapi saat ini masih terdapat beberapa satuan khususnya Batalyon Raider masih memiliki kompi-kompi yang terpisah pangkalannya dan tidak memiliki sarana transportasi yang memadai untuk standart kecepatan berkumpul yang dituntut oleh penugasan, sehingga diperlukan penataan pangkalan yang sedemikian rupa agar dapat mendukung kebutuhan tersebut. Selain itu diperlukan lokasi pangkalan yang dekat dengan bandara sebagai fasilitas embarkasi cepat serta memiliki jalur khusus kearah bandara tanpa melalui prosedur yang panjang, atau pangkalan tersebut harus memiliki Hellypad yang dapat didarati oleh alat angkut heli yang dapat mengangkut pasukan minimal setingkat kompi. Kondisi pangkalan yang dimiliki TNI AD di seluruh wilayah Indonesia masih belum seperti yang diharapkan.

5) Peranti lunak. System dan metoda yang memberikan perlindungan hukum pada pelaksanaan operasi menanggulangi ancaman asimetris serta kemauan politik Negara yang dapat mendukung operasi penanggulangan terhadap ancaman asimetris perlu dipertajam dan diatur secara jelas. Peraturan pelaksanaan pelibatan TNI AD dalam menghadapi ancaman asimetris haruslah diperjelas, apakah memerlukan keputusan politik ataupun cukup mengikuti aturan-aturan regular yang merupakan prosedur tetap yang berlaku dilingkungan TNI AD.

Mabesad telah mengeluarkan berbagai buku petunjuk yang dapat dipedomani dalam pelaksanaan berbagai tugas, namun beberapa bujuk tersebut masih ada yang perlu dilengkapi dengan pedoman pelaksanaan di lapangan sehingga menimbulkan keraguan dalam bertindak di lapangan serta direvisi agar tetap selaras dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.

**b. Kemampuan.**

1) Kemampuan Intelijen. Kemampuan intelijen untuk menghadapi ancaman asimetris dirasakan masih kurang memadai terutama kemampuan intelijen dalam bidang penggalangan, hal tersebut diakibatkan kurangnya pelatihan, peralatan dan dukungan dana kegiatan intelijen. Kurangnya pelatihan terlihat dari kemampuan standar insan intelijen yang seharusnya dimiliki oleh setiap satuan ternyata saat ini belum merata pada satuan-satuan kewilayahan. Kemampuan

intelijen yang memadai akan mempermudah mendapatkan informasi atau mencegah kejadian-kejadian yang akan timbul. Keterbatasan Alkapsus intelijen (terkait dengan intelijen teknologi, perangkat-perangkat teknologi yang mutakhir, sehingga tidak tertinggal dari sisi penguasaan) yang dimiliki oleh satuan kewilayahan menghambat upaya guna memperoleh informasi secara cepat dan akurat. Keterbatasan dukungan dana kegiatan intelijen mengakibatkan banyak satuan bawah yang tidak menindaklanjuti informasi awal yang diterima, namun hanya sekedar melanjutkan informasi kepada komando atas.

Secara umum kualitas personel intelijen yang ada di satuan TNI AD (Kodam, Korem dan Kodim) belum ideal karena tidak semuanya memiliki kualifikasi intelijen baik tingkat dasar maupun tingkat lanjutan. Idealnya satuan setingkat Korem telah memiliki personel intelijen yang mempunyai kemampuan analisis, sehingga intelijen yang diberikan kepada komandan setingkat Korem yang telah mempunyai kemampuan menjadi Komandan Komando Operasi menerima informasi dan data intelijen yang telah masak. Kondisi saat ini ketika Korem dihadapkan dengan tuntutan tugas yang besar, wilayah penugasan yang luas dan personel yang terbatas, mau tidak mau personel yang ada pasti akan dilibatkan dalam tugas tersebut tanpa melihat kualitasnya. Selain itu petugas intelijen di daerah kurang memiliki pengetahuan tentang ancaman asimetris sehingga belum

dapat berimprovisasi dihadapkan dengan tuntutan tugas di lapangan. Menghadapi kondisi tersebut maka perlu adanya rekrutmen dan penempatan personel militer yang berkualifikasi intelijen pada satuan-satuan TNI AD. Selain itu untuk menyikapi berbagai peristiwa yang terjadi di tanah air, maka perlu juga pembekalan pengetahuan tentang ancaman asimetris baik yang berbasis agama maupun kedaerahan.

Apabila untuk menyiapkan satuan intelijen maupun kemampuan intelijen maka operasional kegiatan intelijen akan mendapatkan hasil yang maksimal untuk mengatasi baik informasi maupun menganalisa situasi yang berkembang untuk dijadikan saran bagi unsur pimpinan untuk mengambil keputusan maka diperlukan menambah kekuatan dan kemampuan serta operasional intelijen.

2) Kemampuan Tempur. Kesiapan TNI AD ditinjau dari sisi kemampuan tempur dapat dilihat dari doktrin TNI AD Kartika Eka Paksi. Pada dasarnya kemampuan tempur TNI AD meliputi hal-hal sebagai berikut:

a) Kemampuan Tempur Strategis. Ditinjau dari kemampuan tempur yang dimiliki Kostrad, Divisi Infanteri, Brigade Infanteri, Batalyon Infanteri dan satuan pendukungnya TNI AD memiliki kemampuan tempur yang memadai dalam menghadapi ancaman perang konvensional, sedangkan untuk menghadapi ancaman asimetris diperlukan penyesuaian taktik dan teknik bertempur khusus. Pada saat ini TNI AD sudah memiliki

pedoman bertempur yang sudah disesuaikan dengan ancaman asimetris dan sudah dimasukkan dalam kurikulum pendidikan/latihan pada lembaga pendidikan yang terdapat di TNI AD. Namun kemampuan tersebut belum sepenuhnya dapat dikuasai oleh prajurit sebagai akibat rendahnya tingkat latihan taktik dan teknik menembak baik didalam operasi di hutan, gunung maupun di perkotaan. Manakala kemampuan tersebut sudah dapat menyesuaikan dengan kondisi yang diinginkan maka diperlukan kebijakan dalam penggunaan satuan, sehingga dapat diproyeksikan untuk mengatasi ancaman asimetris di beberapa lokasi yang berbeda, dalam waktu yang relatif cepat sesuai standar yang ditentukan.

b) Kemampuan Tempur Khusus. Ancaman asimetris khususnya yang berupa ancaman teror telah berkembang secara pesat sehingga dapat menimbulkan kekacauan, kepanikan, ketakutan masyarakat secara luas bahkan secara nasional di samping menimbulkan instabilitas keamanan nasional. Kondisi ini secara politis dan taktis yang diklaim oleh kepolisian sebagai otoritas kewenangannya dalam menanggulangi ancaman tersebut ternyata belum dapat diselesaikan secara tuntas. Menyikapi keadaan tersebut TNI AD melalui pasukan Khusus sebagai bala pertahanan terpusat dan Batalyon-batalyon Raider sebagai bala pertahanan kewilayahan yang telah disiapkan untuk mengatasi aksi teror telah

memiliki kemampuan operasi penanggulangan teror secara taktis maupun teknis.

c) Kemampuan Perlawanan wilayah. Perkembangan ancaman asimetris dapat muncul disegala tempat dan waktu yang tidak diduga dengan kekuatan besar maupun kecil dan mampu merubah tatanan keamanan wilayah. Kodam sebagai Kompartemen Strategis disiapkan memiliki kemampuan menyelenggarakan perlawanan wilayah di darat untuk mencegah, menindak dan menghancurkan ancaman yang timbul diwilayah, sehingga diharapkan Kodam mampu menyelenggarakan dukungan dan memberdayakan semua potensi yang ada untuk mendukung satuan pelaksana operasi dan sekaligus membina penciptaan kondisi keamanan wilayah. Pelaksanaan operasi perlawanan wilayah yang dilaksanakan Kodam memerlukan keputusan politik mulai dari status darurat sipil sampai dengan darurat militer. Ditinjau dari peran dan fungsi Kodam dalam mengatasi ancaman asimetris secara politik taktik dan teknik dapat dilakukan seperti yang diharapkan.

d) Kemampuan Pernika. Kemampuan Pernika yang dimaksud adalah merupakan kemampuan gelar peralatan Pernika dan kemampuan teknis peralatan Pernika. Kemampuan gelar Pernika TNI AD saat ini adalah 1 (satu) kompi Pernika yang berada di Yonhub, 1 (satu) Denpernika di Kostrad, dan 1 (satu) subden pernika Denhub Kodam

dimana semua organisasi tersebut masih belum sesuai dengan TOP/DSPP. Kemampuan teknis peralatan Pernika masih terbatas pada kemampuan menyamar, menyandi, memonitor dan menentukan lokasi pemancar pada frequency HF, VHF dan UHF dengan sangat terbatas. Sedangkan kemampuan yang diharapkan adalah kemampuan yang disebutkan diatas dilengkapi pula dengan kemampuan melaksanakan Pernika pada jaring system radar, Sonar, Jaringan Komputer, system penginderaan, system kendali dan system jeming.

e) Kemampuan Nubika. Kemampuan Nubika yang dimaksud adalah kemampuan melaksanakan pengamanan secara terbatas terhadap kemungkinan serangan bahaya Nubika. Satuan Nubika yang dimiliki TNI AD saat ini baru merupakan 1 (satu) Kompi Nubika yang berada dibawah Direktorat Zeni TNI AD, dihadapkan pada kemungkinan yang terjadi pada lokasi yang jauh dari jangkauan satuan tersebut maka diperlukan satuan-satuan yang ada di wilayah memiliki kemampuan yang setingkat atau minimal memiliki kemampuan mengisolasi dan membatasi dampak pengaruhnya. Sejalan dengan berkembangnya teknologi, Nubika dapat dimanfaatkan sebagai ancaman asimetris dimana penggunaan material Nubika dimanfaatkan sebagai senjata biologi dan kimia berupa gas beracun (gas sarin, dan sebagainya), termasuk kombinasi bahan peledak dengan bahan kimia. Pada saat ini satuan yang



dapat memberikan pengamanan terhadap bahaya serangan Nubika seperti ini adalah hanya Satuan Nubika yang dimiliki TNI AD berupa 1 (satu) Kompi Nubika yang berada dibawah Direktorat Zeni TNI AD di Jakarta, sehingga perlu adanya pembelajaran kemampuan pengamanan awal terhadap serangan Nubika, paling tidak kemampuan membatasi dan mengisolasi akibat dari dampak yang lebih luas.

3) Kemampuan Binter. Ditinjau dari kemampuan yang dimiliki oleh satuan komando kewilayahan dan satuan non komando kewilayahan.

a) Kemampuan personel satuan komando kewilayahan. Masih banyak personel satuan komando kewilayahan yang belum memiliki kemampuan sesuai dengan jabatan yang diembannya. Dengan kurangnya kemampuan tersebut mengakibatkan kurang maksimalnya dalam mendukung pelaksanaan tugas. Adapun kekurangan tersebut antara lain pendidikan yang belum sesuai dengan tingkat jabatannya, penugasan yang tidak sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya dan pola pembinaan karier/jabatan. Pola yang dilakukan dalam bidang pendidikan, penugasan maupun pembinaan secara bertahap akan meningkatkan kemampuannya dalam melaksanakan tugas. Personel intelijen dilapangan masih sangat lemah dalam mencari, mengumpulkan dan mengolah informasi serta data yang dapat dikualifikasi sebagai ancaman asimetris

sebagai data intelijen bagi satuan yang melaksanakan pertempuran dengan meningkatkan kemampuan melalui pendidikan dan latihan serta dukungan anggaran dalam pelaksanaan kegiatan operasionalnya. Satuan kewilayahan yang disiapkan untuk mendukung kegiatan operasi di wilayahnya diharapkan sejak dini dapat mengantisipasi kemungkinan ancaman asimetris sesuai fungsinya dengan menyediakan data kewilayahan baik Geo, Demo dan Konsos melalui kegiatan Binter sehingga setiap aparat kewilayahan berupaya aktif mendorong tokoh agama untuk memberikan ceramah agama sesuai aqidah agama yang benar, mengecek daerah terpencil, mengawasi aktifitas orang asing diwilayahnya, mengaktifkan siskamling dan mengecek rumah kost/kontrakan.

b) Kemampuan pembinaan satuan komando kewilayahan. Kemampuan personel satuan komando kewilayahan dihadapkan pada ancaman asimetris, yang menuntut adanya kemampuan pembinaan teritorial dinilai perlu adanya peningkatan khususnya kemampuan manajemen teritorial, komunikasi sosial dan kemampuan perlawanan wilayah. Hal ini disebabkan kurang optimalnya kemampuan tersebut oleh personel satuan kewilayahan.

c) Kemampuan personel non komando kewilayahan. Sebagaimana diketahui bahwa satuan non komando kewilayahan hanya memiliki kemampuan Binter secara

terbatas. Oleh karena itu jika dihadapkan pada ancaman asimetris maka kemampuan Binter terbatas yang dimiliki memang perlu ditingkatkan. Upaya untuk meningkatkan kemampuan tersebut bisa dilakukan melalui pelatihan terus-menerus mengingat perkembangan ancaman asimetris yang setiap saat akan muncul. Dengan demikian satuan non komando kewilayahan akan siap menghadapi kapan saja ancaman asimetris muncul diwilayahnya.

4) Kemampuan dukungan. Ditinjau dari minimnya kemampuan dukungan penganggaran Negara pada sektor pertahanan, maka kebijakan dukungan yang diberikan dengan ukuran MEF (Minimum Essential Force)<sup>3</sup> seyogyanya mampu memberikan dukungan minimal yang dapat melaksanakan tugas mengatasi ancaman asimetris, yang meliputi kemampuan:

a) Kemampuan diplomasi militer. Kemampuan diplomasi militer saat ini telah dilakukan secara kontinyu dan terprogram untuk bekerja sama dengan negara-negara sahabat, hal ini dapat dilihat dari adanya prajurit yang disiapkan untuk memiliki kemampuan diplomasi secara militer khususnya untuk pelaksanaan operasi yang bersifat pencegahan, TNI AD melakukan penyiapan personelnnya, organisasinya serta pembekalan dengan kerjasama di bidang pendidikan, pelatihan, operasi bersama,

---

<sup>3</sup> MEF Nomor Perkasad/39/VIII/2009 tanggal 24 Agustus 2009, Revisi MEF Nomor Perkasad/ 32/VIII/ 2010 tanggal 20 Agustus 2010.

kunjungan, dan kerjasama industri pertahanan dalam rangka mencegah keinginan permusuhan dari negara lain. Pada kebutuhan lain Kemampuan diplomasi militer juga perlu disiapkan untuk melakukan negosiasi penyelesaian konflik baik yang sedang terjadi dan dapat memicu terjadinya ancaman asimetris di dalam negeri maupun pemulihan hubungan baik antar negara pasca konflik.

b) Penguasaan Ilpengtek Industri Militer. TNI khususnya TNI AD sebagai alat pertahanan negara matra darat dihadapkan dengan luas wilayah dan kondisi struktur geografis yang berbeda selain kemampuan gelar satuan dalam rangka mengamankan wilayah yang menjadi tanggung jawabnya untuk menghadapi ancaman asimetris perlu didukung alat peralatan yang lebih modern sesuai dengan perkembangan ilpengtek . Namun dengan kondisi dukungan anggaran yang sangat terbatas perlu adanya kebijakan strategis dalam memenuhi kebutuhan alat peralatan TNI AD dengan memberdayakan industri militer dalam negeri kekurangn dan kelemahan selama ini dalam hal penguasaan teknologi dapat diatasi dengan memberikan kesempatan lebih banyak kepada prajurit TNI AD untuk belajar di luar negeri terutama ke negara yang memiliki kemampuan tehnologi militer lebih maju dan diakui keunggulannya oleh negara lain.

c) Kemampuan manajemen. Pada organisasi modern pada umumnya pengelolaan menggunakan sistem manajemen modern pula, kemampuan manajemen diperlukan untuk menjamin kepastian tercapainya sasaran yang diinginkan. Kemampuan manajemen perlu disiapkan untuk melaksanakan kegiatan organisasi secara teratur serta menggunakan mekanisme dan prosedur baku agar dapat menghilangkan keragu-raguan dalam mengambil tindakan yang efisien, efektif, tepat, dan terukur. Kemampuan manajemen pada organisasi TNI AD saat ini masih belum terdapat keseragaman dan standarisasi, sehingga menimbulkan penafsiran yang berbeda-beda. Pada akhirnya memiliki outcome yang berbeda dari apa yang sudah direncanakan pada program. Dengan demikian maka perlu memberikan kemampuan manajemen yang sama kepada unsur pemimpin dilapangan melalui pendidikan dan latihan tertentu untuk dapat memelihara tujuan yang ditetapkan tadi. Pada operasi penanggulangan ancaman asimetris diperlukan suatu manajemen yang jelas dan tegas serta seragam, sehingga diperoleh hasil yang maksimal.

d) Kemampuan dalam menyelenggarakan K4IPP. Kemampuan ini disiapkan untuk mendukung setiap pelaksanaan kegiatan, khususnya kegiatan operasional dalam rangka mengendalikan kegiatan sesuai dengan rencana dan dinamika yang terjadi. Kemampuan tersebut

termasuk dalam kemampuan alat elektronika dalam kemampuan Pernika. Dihadapkan dengan pengendalian operasi pada ancaman asimetris maka kemampuan dukungan dalam penyelenggaraan K4IPP masih sangat memungkinkan untuk dilaksanakan, walaupun masih perlu peningkatan dibidang pengetahuan dan teknologi.

e) Kemampuan untuk melaksanakan bantuan kepada Pemda dan Polri. Undang-undang Nomor 34 tahun 2004 tentang TNI pada 14 tugas TNI pada OMSP disebutkan tugas membantu Pemerintah dan Polri, amanat undang-undang ini dapat terlaksana dengan suatu kondisi tertentu. Saat ini akibat pengaruh keputusan politik kekuatan satuan TNI hanya dapat memberikan bantuan bila ada keputusan politik. Diperlukan regulasi/peraturan pemerintah yang mengatur pelibatan TNI dalam melaksanakan bantuan TNI kepada Pemerintah dan Polri. Dengan demikian disamping protap permintaan nya, perlu dirumuskan bagaimana tatacara membantu tersebut. Batasan membantu sampai sejauhmana, kewenangan bantuan dalam penanganan perlu adanya pembatasan yang jelas sehingga memiliki perlindungan hukum terhadap pelaksanaan tugas. Bantuan terhadap pemerintah hanya dibatasi pada kemampuan TNI AD dalam bidang kemanusiaan, sedangkan membantu kepolisian untuk memulihkan Kamtibmas dalam kerangka tugas operasional sesuai pengetahuan dan kemampuan teknis

operasional TNI AD bukan sebagai tugas polisionil, sehingga tidak diperlukan tambahan pengetahuan tentang operasi polisionil tetapi cukup pengetahuan teknis militer. Pada tingkatan yang lebih tinggi diperlukan adanya suatu Peraturan Pemerintah yang dapat mengatur kewenangan dan batas kewenangan pada prosesnya. Bila dihadapkan pada kemungkinan ancaman asimetris maka pada saat muncul indikasi awal ancaman asimetris akan berhadapan dengan unsur wilayah dalam hal ini Pemda dan polri sehingga pemahaman bantuan TNI tersebut dapat dikategorikan sebagai early warning system.

c. **Gelar.** Ditinjau dari gelar terpusat, satuan Kostrad dan Kopassus serta gelar satuan kewilayahan Kodam-kodam dengan perkuatannya memiliki kemampuan dalam menghadapi ancaman asimetris. Namun demikian gelar tersebut efektivitasnya menjadi menurun apabila ditinjau dari lokasi-lokasi kejadian konflik yang terjadi selama ini di Indonesia. Perlu pengkajian terpisah secara seksama gelar satuan yang ada dikaitkan dengan lokasi konflik terjadi. Misalnya konflik di Ambon, pasukan yang tersedia untuk segera bertindak hanyalah 3 (tiga) Batalyon Infanteri. Dikaitkan dengan mekanisme pemberian bantuan yang terjadi selama ini, maka eskalasi konflik sudah jauh meningkat di luar batas kemampuan Polri pada saat permintaan bantuan atau perintah membantu diterima TNI AD.

Akibatnya dukungan transportasi yang dimiliki TNI tidak mampu untuk segera memindahkan belasan Batalyon yang perlu segera dihadirkan untuk memadamkan konflik. Begitu pula ancaman konflik di Aceh dan Papua perlu diwaspadai, karena sejarah mencatat konflik semacam ini selalu melibatkan 4 aktor yaitu pemerintah termasuk TNI, gerakan separatis atau perusuh, populasi atau masyarakat dan pihak Luar Negeri. Perebutan hati dan pikiran rakyat atau populasi akan menentukan apakah konflik akan berkembang atau bisa segera dipadamkan. Inilah salah satu alasan, perlunya mengkaji secara komprehensif gelar satuan dikaitkan kemungkinan ancaman asimetris yang akan timbul.



## **BAB-V**

### **P E N U T U P**

#### **16. Kesimpulan.**

- a. Berbagai macam perkembangan yang terjadi baik di luar negeri maupun di dalam negeri yang berkaitan dengan konflik seperti yang terjadi di luar negeri konflik di Filipina, Thailand dan Afganistan, dan di dalam negeri seperti; Separatis Aceh dan Papua, Konflik Horizontal Ambon, Poso dan Sampit, merupakan potensi terjadinya bentuk ancaman asimetris yang dapat membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara dan keselamatan hidup bangsa Indonesia.
- b. Ancaman asimetris yang dihadapi TNI AD sebagai komponen utama dalam Sistem Pertahanan Negara di darat terdiri dari :
  - 1) Ancaman yang dapat membahayakan kedaulatan negara berupa separatis dan pemberontakan bersenjata.
  - 2) Ancaman yang membahayakan keutuhan wilayah yang diakibatkan oleh pengaruh instabilitas keamanan Nasional yang disebabkan kegiatan terorisme.
  - 3) Ancaman yang dapat membahayakan keselamatan hidup bangsa Indonesia berupa Konflik Horizontal.

c. TNI AD sebagai bagian dari TNI dituntut kesiapannya dalam kekuatan, gelar satuan dan kemampuan prajurit dalam menghadapi ancaman asimetris, sehingga perlu adanya peningkatan terutama kemampuan intelijen, pemenuhan personel, alkapsus anti teror, pangkalan dan peranti lunak tentang ancaman asimetris.

17. **Rekomendasi.** TNI AD perlu disiapkan sejak awal untuk menghadapi ancaman asimetris, meliputi:

a. **Kekuatan.**

1) Organisasi. Untuk satuan pelaksana penanggulangan ancaman asimetris diperlukan:

a) Perlu di kembangkan satuan intelijen di tingkat pelaksana.

b) Penataan organisasi Babinsa (1 Desa 1 Babinsa).

2) Personel. Perlu dilakukan langkah penataan personel serta meningkatkan kualitas yang padat teknologi pada satuan Banmin

3) Materiil. Untuk menyiapkan satuan penanggulangan yang memadai diperlukan penambahan kemampuan alat material khusus (almatsus) dan alat komunikasi khusus (alkomsus).

4) Pangkalan. Diperlukan penataan pangkalan agar dapat mendukung kebutuhan kecepatan pengerahan satuan.

5) Penak/Sistoda. Diperlukan regulasi/peraturan pemerintah sebagai payung hukum yang mengatur pelibatan TNI dalam melaksanakan penanggulangan terhadap ancaman asimetris. Disamping peranti lunak yang berlaku dalam lingkungan TNI, perlu dirumuskan tataran pelaksanaan.

**b. Kemampuan**

1) Kemampuan Intelijen. Peningkatan kemampuan temu cepat dan lapor cepat yang dilaksanakan dengan melalui pendidikan dan latihan serta adanya dukungan sarana dan prasarana khususnya sarana transportasi, komunikasi dan almatsus intel lainnya serta penambahan perwira yang berkemampuan analisis.

2) Kemampuan tempur. Perlu adanya peningkatan volume latihan taktik dan teknis menembak baik di hutan, gunung maupun diperkotaan.

Bandung, November 2010  
Komandan Seskoad



Markus Kusnowo  
Mayor Jenderal TNI